

NORMALISASI KEKERASAN DAN GENEALOGI KEKUASAAN AMERIKA SERIKAT: STUDI FOUCAULDIAN ATAS PENANGKAPAN NICOLÁS MADURO TAHUN 2026

Muhammad Rafi Al Ezzra ¹⁾

Jehosea Andito Penna ²⁾

Imelda Masni Juniaty Sianipar ^{3*)}

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia¹⁾

email: rafialezzr@gmail.com

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia ²⁾

email: Jehoseaanditopenna04@gmail.com

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia ³⁾

email: imelda.sianipar@uki.ac.id

*Corresponding Author

email: imelda.sianipar@uki.ac.id

Article Info

ABSTRACT

Article History:

Received:

February/2026

Accepted:

April/2026

Published:

June/2026

Key words: narco-terrorism, lawfare, sovereignty, discourse, United States foreign policy

Kata kunci: terorisme narkoba, perang hukum, kedaulatan, wacana, kebijakan luar negeri Amerika Serikat

This study examines the rationality behind the United States military operation Operation Absolute Resolve conducted in January 2026, which resulted in the capture of Venezuelan President Nicolás Maduro. Although officially framed as a law-enforcement action against narco-terrorism, this article argues that the operation was shaped by a historically contingent discursive construction. Drawing on Michel Foucault's genealogy of power, the study analyzes how regimes of truth are produced to legitimize coercive extraterritorial intervention. Employing a qualitative genealogical method, the analysis traces historical lineages (Herkunft) and moments of emergence (Entstehung) in U.S. interventionist discourse toward Latin America. The findings demonstrate that the narco-terrorism narrative recycles justificatory strategies from the 1989 invasion of Panama, marginalizes counter-narratives of sovereignty, and weaponizes international law as lawfare. The study concludes that these dynamics signal a shift toward "Contingent Sovereignty."

ABSTRAK

Studi ini meneliti rasionalitas di balik operasi militer Amerika Serikat, Operasi Absolute Resolve, yang dilakukan pada Januari 2026, yang mengakibatkan penangkapan Presiden Venezuela

Nicolás Maduro. Meskipun secara resmi dibingkai sebagai tindakan penegakan hukum terhadap terorisme narkoba, artikel ini berpendapat bahwa operasi tersebut dibentuk oleh konstruksi wacana yang bergantung pada konteks sejarah. Dengan mengacu pada genealogi kekuasaan Michel Foucault, studi ini menganalisis bagaimana rezim kebenaran diproduksi untuk melegitimasi intervensi ekstrateritorial yang bersifat memaksa. Dengan menggunakan metode genealogi kualitatif, analisis ini menelusuri garis keturunan historis (Herkunft) dan momen kemunculan (Entstehung) dalam wacana intervensi AS terhadap Amerika Latin. Temuan menunjukkan bahwa narasi terorisme narkoba mendaur ulang strategi pembenaran dari invasi Panama tahun 1989, meminggirkan narasi tandingan kedaulatan, dan mempersenjatai hukum internasional sebagai perang hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa dinamika ini menandakan pergeseran menuju “Kedaulatan Bersyarat.”

PENDAHULUAN

Pada Januari 2026, Amerika Serikat melaksanakan *Operation Absolute Resolve* di Venezuela yang berujung pada penahanan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di Caracas-(Brookings Institution, 2026). Operasi ini secara resmi dibingkai sebagai tindakan penegakan hukum terhadap tuduhan narco-terrorism dan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat (Bulletin of the Atomic Scientists, 2026) dan menargetkan fasilitas militer secara presisi, menegaskan eskalasi ketegangan antara kekuatan besar dan Venezuela, serta memperlihatkan dimensi politik dan strategis dari tindakan militer tersebut (Carnegie Endowment for International Peace, 2026).

Reaksi global terhadap operasi ini cukup keras. Sekjen PBB, António Guterres, menyatakan keprihatinan terkait potensi ketidakstabilan regional dan pelanggaran prinsip hukum internasional (Nichols, 2026). Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang ditandatangani pada tahun 1945 menyatakan bahwa: *All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*”(www.un.org, n.d.) Amerika Serikat menggunakan pasal 51 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa *"shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations."*(www.un.org, n.d.) Sekutu Venezuela yaitu Rusia, Cina dan Kolombia menilai tindakan AS sebagai intervensi ilegal yang mengabaikan kedaulatan negara (Nichols, 2026).

Berbagai laporan juga memperingatkan dampak politik dan sosial di Amerika Latin, karena operasi ini dapat memperdalam krisis yang telah berlangsung dan membentuk preseden untuk tindakan militer lintas batas oleh

negara kuat (Forsans, 2026). Selain aspek militer, operasi ini terkait erat dengan strategi ekonomi dan hukum yang diterapkan AS terhadap Venezuela. Menurut Congressional Research Service / CRS, kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela bertumpu pada penggunaan sanksi dan tekanan diplomatik sebagai sarana utama untuk mempengaruhi dinamika politik di bawah pemerintahan Maduro (Congressional Research Service, 2025). Sementara itu, analisis hukum oleh Holland & Knight menyoroti risiko hukum dan ketidakpastian investasi, menunjukkan bahwa konsekuensi operasi militer tidak hanya berdimensi politik, tetapi juga mempengaruhi aspek ekonomi dan stabilitas hukum di kawasan (Connor et al., 2026).

Penggunaan kekuatan militer lintas batas terhadap kepala negara berdaulat menimbulkan persoalan mendasar mengenai legitimasi hukum internasional, prinsip kedaulatan, serta normalisasi kekerasan ekstrateritorial dalam politik global kontemporer. Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merefleksikan pola historis intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin yang secara konsisten dibenarkan melalui konstruksi wacana ancaman, mulai dari anti-komunisme pada era Perang Dingin hingga perang melawan narkoba dan terorisme pada periode pasca-Perang Dingin. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intervensi Amerika Serikat di Panama pada 1989 dilegitimasi melalui narasi hukum dan keamanan yang serupa, meskipun berujung pada kegagalan politik dan pelanggaran prinsip kedaulatan (Calvert, 1990; Weeks & Zimbalist, 1989). Studi lain menyoroti evolusi konsep narco-terrorism sebagai hasil peleburan diskursif antara perang melawan narkoba dan perang melawan terorisme (Björnehed, 2004) serta penggunaan sanksi ekonomi dan tekanan hukum sebagai instrumen perubahan rezim di Venezuela (Congressional Research Service, 2025; Connor et al., 2026). Namun, kajian yang secara sistematis menelusuri bagaimana wacana tersebut berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan untuk menormalisasi kekerasan militer lintas batas masih relatif terbatas.

Bertolak dari celah tersebut, penelitian ini mengajukan satu pertanyaan utama: bagaimana konstruksi wacana hukum dan keamanan digunakan untuk melegitimasi kekerasan ekstrateritorial dalam *Operation Absolute Resolve*? Dengan menggunakan pendekatan genealogis Michel Foucault, penelitian ini bertujuan menelusuri genealogi kekuasaan di balik operasi tersebut, dengan fokus pada bagaimana praktik militer, instrumen hukum, dan wacana politik membentuk rezim kebenaran yang membenarkan intervensi terhadap negara berdaulat. Lingkup penelitian dibatasi pada analisis diskursif dan genealogis, tanpa menilai aspek teknis-operasional militer. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa penangkapan Nicolás Maduro bukan sekadar penegakan hukum, tetapi bentuk normalisasi kekerasan melalui wacana legalitas, keamanan, dan hegemoni Amerika Serikat. Lingkup penelitian dibatasi pada analisis diskursif dan genealogis, tanpa menilai aspek teknis-operasional militer, guna memberikan kontribusi kritis terhadap pemahaman hubungan antara kekuasaan, hukum, dan keamanan dalam tatanan global kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Genealogi Kekuasaan yang dikembangkan oleh Michel Foucault karena berfokus pada pemahaman makna, konstruksi wacana, dan relasi kuasa di balik pelabelan “narko-terorisme” terhadap Venezuela. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan membongkar bagaimana suatu kebenaran politik dan hukum diproduksi melalui praktik diskursif. Pendekatan Genealogi Kekuasaan relevan karena sama-sama menekankan penelusuran proses historis, pertarungan pengetahuan, dan praktik sosial yang membentuk legitimasi kekuasaan.

Genealogi Foucault bekerja melalui dua perangkat analisis utama, yaitu *Herkunft* (garis keturunan) untuk menemukan diskontinuitas atau jejak sejarah masa lalu yang membentuk kondisi saat ini, serta *Entstehung* (kemunculan) untuk melacak momen ketika kekuasaan memaksakan pengetahuan tertentu dalam pertarungan wacana (Michel Foucault, 1980). Dengan kerangka ini, tuduhan “narko-terorisme” terhadap Venezuela tidak dipahami sebagai fakta hukum yang netral, melainkan sebagai hasil konstruksi politik yang lahir dari strategi Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoninya. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini membongkar bagaimana wacana hukum, keamanan, dan media digunakan untuk membongkar bagaimana wacana hukum, keamanan, dan media digunakan Amerika Serikat untuk membentuk rezim kebenaran yang melegitimasi intervensi terhadap Venezuela, sehingga pendekatan genealogis menjadi alat untuk memahami “*history of the present*” dalam relasi kuasa global (Hewitt, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis data sekunder. Untuk membangun kerangka analisis, penelitian ini mengekstrak sumber data primer teoritis dari dua karya Michel Foucault, yaitu *Discipline and Punish* (Michel Foucault, 1995) dan *Power/Knowledge* (1980). Kemudian, data kasus dikumpulkan dari dokumen kebijakan luar negeri, laporan lembaga *think-tank* seperti Carnegie Endowment for International Peace dan artikel analisis akademik mengenai dinamika konflik AS-Venezuela di era Donald Trump. Analisis data melalui pembedahan arsip-arsip ditujukan untuk membongkar bagaimana “Rezim Kebenaran” (laporan intelijen, dakwaan hukum, dan narasi media) diproduksi dan didistribusikan oleh Amerika Serikat untuk mendisiplinkan Rezim Nicolas Maduro, serta menggambarkan bagaimana legitimasi sanksi ekonomi sampai militer bisa dibentuk melalui pengetahuan untuk memberikan kesan bahwa tindakan ini rasional dan bermoral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami rasionalitas di balik Operasi *Absolute Resolve* pada Januari 2026, kita tidak dapat melihat penangkapan Presiden Nicolas Maduro sebagai peristiwa hukum yang berdiri sendiri atau sekadar respons reaktif terhadap ancaman keamanan sesaat. Sebaliknya, peristiwa ini harus dipahami melalui kacamata genealogi Foucault sebagai puncak dari sedimentasi praktik kekuasaan yang panjang. Laporan dari *Brookings Institution* mencatat bahwa operasi militer ini dibingkai oleh Washington sebagai intervensi kemanusiaan yang mendesak untuk mengamankan aset energi dan memulihkan demokrasi di tengah

ketidakstabilan global (Brookings Institution, 2026). Namun, di balik bingkai moralitas tersebut, terdapat operasi kekuasaan yang bekerja melalui produksi "kebenaran".

Dalam penelitian ini, konstruksi kekuasaan dan normalisasi kekerasan dianalisis melalui berbagai teks resmi dan diskursif yang diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu dokumen resmi pemerintah, laporan *think tank*, dan media internasional. Dokumen resmi pemerintah meliputi dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (US *Department of Justice/DOJ*), laporan *Congressional Research Service*, serta dokumen resmi pemerintah Venezuela dan ALBA-TCP sebagai representasi narasi tandingan dari Global South. Data dari *think tank* Amerika Serikat meliputi laporan dari Brookings Institution, Carnegie Endowment for International Peace, dan Council on Foreign Relations yang banyak membahas kebijakan luar negeri, keamanan, serta legitimasi intervensi terhadap Venezuela. Sementara itu, data dari media internasional dan media analitis diperoleh dari LSE USAPP Blog serta berbagai pemberitaan global yang mengamplifikasi isu "*narco-terrorism*", "*failed state*", dan ancaman terhadap demokrasi. Seluruh sumber tersebut dianalisis untuk membongkar bagaimana wacana hukum dan keamanan diproduksi, disebarluaskan, dan digunakan untuk melegitimasi kekerasan ekstrateritorial Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Teks-teks tersebut diperlakukan sebagai arena utama produksi wacana hukum dan keamanan yang membentuk legitimasi terhadap intervensi ekstrateritorial. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menelusuri bagaimana label seperti "*narco-terrorism*", "*failed state*", dan "*threat to democracy*" diproduksi, disebarluaskan, dan diterima sebagai kebenaran politik global. Dalam perspektif Foucauldian, hukum tidak bekerja sebagai instrumen netral, melainkan sebagai bagian dari *regime of truth* yang memproduksi subjek kriminal dan membenarkan penggunaan kekerasan lintas batas.

Selanjutnya, penelitian ini membedah secara mendalam bagaimana sejarah (*Herkunft*) dan momentum kemunculan institusional (*Entstehung*) saling berkelindan membentuk rezim kebenaran yang menjustifikasi pelanggaran kedaulatan Venezuela. Konsep *Herkunft* dalam genealogi bertujuan menemukan disosiasi dan garis keturunan yang sering kali terlupakan di balik narasi sejarah yang tampak linier. Dalam konteks kebijakan luar negeri AS, label "narko-terorisme" yang disematkan kepada Maduro bukanlah sebuah inovasi diskursif yang baru muncul di era Trump. Analisis dari Maresca menyoroti bahwa kebijakan Trump di periode kedua ini merupakan intensifikasi dari doktrin "*America First*" yang menolak multilateralisme demi keuntungan unilateral (Maresca, 2026). Namun, jika ditelusuri lebih jauh, strategi ini memiliki "leluhur" yang jelas. Analisis genealogi mengungkapkan bahwa narasi kriminalisasi terhadap Maduro memiliki "garis keturunan" (*descent*) langsung dari strategi Amerika Serikat saat menginvasi Panama pada tahun 1989. Arsip sejarah hukum menunjukkan adanya *isomorphism* (kesamaan bentuk struktural) yang mencolok antara dakwaan terhadap Manuel Noriega dan Nicolas Maduro.

Pada musim semi 1988, Amerika Serikat mengalami salah satu kegagalan

besar dalam kebijakan luar negerinya di Amerika Latin dan membenarkan intervensi militernya di Panama (Calvert, 1990) dengan alasan melindungi warga AS, membela demokrasi, memberantas perdagangan narkoba, serta menjaga keutuhan Perjanjian Terusan Panama (Weeks & Zimbalist, 1989). Dalam kasus *United States v. Noriega* (1990), Amerika Serikat untuk pertama kalinya menggunakan sistem peradilan domestik untuk mengkriminalisasi kepala negara asing yang menjabat secara de facto, dengan tuduhan mengubah Panama menjadi pusat pencucian uang dan jalur transit kokain bagi kartel Kolombia.

Pola diskursif ini direaktivasi oleh Departemen Kehakiman AS melalui dakwaan tahun 2020 terhadap Nicolás Maduro. Seperti Noriega, Maduro dituduh memimpin *Cartel de los Soles* (Kartel Matahari), yakni jaringan pejabat negara dan militer Venezuela yang memanfaatkan sumber daya negara untuk perdagangan kokain (Sullivan & Jones, 2024), yang oleh US DOJ digambarkan sebagai upaya “membanjiri Amerika Serikat dengan kokain” (United States Department of Justice, 2020). Pada 26 Maret 2020, Departemen Kehakiman AS mendakwa pemimpin Venezuela Nicolás Maduro beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya atas tuduhan *narco-terrorism*. Dalam konferensi pers, Jaksa Agung Amerika Serikat William P. Barr menyatakan

“The Venezuelan regime, once led by Nicolás Maduro Moros, remains plagued by criminality and corruption,” said Attorney General Barr. “For more than 20 years, Maduro and a number of high-ranking colleagues allegedly conspired with the FARC, causing tons of cocaine to enter and devastate American communities. Today’s announcement is focused on rooting out the extensive corruption within the Venezuelan government – a system constructed and controlled to enrich those at the highest levels of the government. The United States will not allow these corrupt Venezuelan officials to use the U.S. banking system to move their illicit proceeds from South America nor further their criminal schemes.” (United States Department of Justice, 2020).

Dengan pernyataan ini, Maduro tidak lagi diposisikan sebagai kepala negara berdaulat, melainkan sebagai subjek kriminal internasional yang berada dalam jangkauan hukum domestik Amerika Serikat. Pergeseran label musuh ini sangat strategis. Di era Perang Dingin, legitimasi intervensi dibangun di atas narasi "Anti-Komunisme". Namun, pasca-runtuhnya Uni Soviet, AS membutuhkan "hantu" baru untuk membenarkan kehadiran militernya di Amerika Latin. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan Greg Grandin dalam *Empire's Workshop* (2006), Amerika Latin sering kali berfungsi sebagai laboratorium bagi AS untuk menguji coba taktik imperialisme baru sebelum diterapkan secara global (Grandin, 2006). Oleh karena itu, *Herkunft* dari operasi 2026 ini membuktikan bahwa tindakan tersebut bukan penegakan hukum murni, melainkan daur ulang strategi "politisasi kriminalitas" yang pernah sukses menjatuhkan Noriega. Narasi yang disebut oleh Schadlow sebagai upaya mengembalikan kejayaan Amerika (Schadlow, 2024) sejatinya adalah repetisi sejarah untuk mendepolitisasi kedaulatan Venezuela di mata dunia.

Di balik dominasi wacana “narko-terorisme” yang diproduksi secara masif

oleh Washington dan diamplifikasi oleh media global, terdapat apa yang disebut Foucault sebagai *subjugated knowledge*, yaitu serangkaian pengetahuan historis, lokal, dan tandingan yang didiskualifikasi atau dikubur oleh hierarki wacana yang berkuasa. Laporan investigatif dari LSE USAPP Blog secara kritis menyebut bahwa “perang ilegal” Trump di Venezuela didasarkan pada kepalsuan (*falsehoods*) dan manipulasi narasi untuk menciptakan kesan kedaruratan. Jim Rice menulis bahwa “*The Trump administration’s escalating actions against Venezuela, including boat strikes, oil-tanker seizures, and a naval blockade, are grounded in a pattern of deliberate falsehoods rather than legal or moral justification*” (Rice, 2026). Ia menegaskan bahwa serangan kapal, penyitaan tanker minyak, hingga blokade laut terhadap Venezuela tidak dibangun atas dasar legitimasi hukum internasional maupun moralitas politik, melainkan melalui konstruksi narasi ancaman yang sengaja diproduksi untuk membenarkan tindakan koersif Amerika Serikat. Dengan demikian, kekerasan ekstrateritorial tidak tampil sebagai agresi, tetapi sebagai respons sah terhadap ancaman keamanan global.

Sementara Departemen Kehakiman AS membingkai sanksi ekonomi dan operasi militer sebagai “upaya penyelamatan demokrasi” dan “penegakan hukum terhadap kartel” (United States Department of Justice, 2020), narasi dari Selatan Global mendefinisikan tindakan ini secara diametral berbeda. Pada 8 Agustus 2025, negara-negara anggota ALBA-TCP mengutuk tindakan Amerika Serikat sebagai “*agresi mitomaniak*” yang merupakan pelanggaran terang-terangan dan vulgar terhadap hukum internasional. Menurut ALBA-TCP, tuduhan terhadap Presiden Nicolás Maduro bukanlah upaya penegakan hukum, melainkan tipu daya lama untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan sistematis yang setiap hari dilakukan oleh kekaisaran Amerika terhadap Venezuela dan kawasan Amerika Latin (Mazo4f.com, 2025). Sebelumnya, pada 18 Juni 2024, melalui jejaring sosial X, Jorge Arreaza selaku Sekretaris Eksekutif ALBA-TCP juga mengutuk tindakan pemerintah Amerika Serikat yang mencabut kepemilikan perusahaan CITGO dari Venezuela. Arreaza menyatakan: “*this is an unprecedented act of economic piracy, with direct consequences on the well-being of the people, in Washington’s cynical and extortionist effort to suffocate the Venezuelan economy.*” Ia juga menambahkan: “*the Bolivarian Alliance reiterates its unrestricted support for the Venezuelan authorities in defense of this important energy company.*” (Mazo4f.com, 2024).

Namun, mekanisme *power/knowledge* bekerja efektif di sini. Narasi dominan yang dicatat oleh *Center for Preventive Action, Council on Foreign Relations* yang fokus sepenuhnya pada “ketidakstabilan internal” dan kegagalan pengelolaan ekonomi Venezuela (Center for Preventive Action, 2026) telah berhasil menutupi (*subjugate*) perspektif Venezuela tersebut. Akibatnya, penderitaan akibat sanksi ekonomi tidak dilihat sebagai dampak agresi eksternal, melainkan kegagalan rezim “kriminal” dalam tata kelola domestik. Label “narko-teroris” berfungsi sebagai alat pembungkam; sebab dalam logika global yang dibangun AS, seorang “kriminal” tidak memiliki hak imunitas berdaulat selayaknya seorang presiden. Di sinilah normalisasi kekerasan bekerja secara paling efektif: kekerasan tidak lagi tampil sebagai agresi terhadap negara berdaulat, tetapi sebagai tindakan moral yang sah demi keamanan global. Penangkapan, sanksi ekonomi, dan ancaman intervensi militer diterima sebagai bentuk penegakan hukum, bukan

ekspansi kekuasaan hegemonik. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen *lawfare*, yaitu penggunaan perangkat legal untuk membenarkan dominasi geopolitik Amerika Serikat.

Jika *Herkunft* melacak asal-usul historisnya, maka *Entstehung* (kemunculan) menyoroti momen spesifik ketika praktik kekuasaan tersebut muncul ke permukaan dengan kekuatan penuh dalam pertarungan kekuatan saat ini. *Carnegie Endowment* mencatat bahwa rencana Trump untuk Venezuela pada 2026 melibatkan konsep radikal "*Fiscal Receivership*" (perwalian fiskal), di mana pendapatan minyak Venezuela akan dikontrol langsung oleh AS untuk "mencegah korupsi" (*Carnegie Endowment for International Peace, 2026*). Namun, landasan hukum bagi perampasan kedaulatan ekonomi ini telah diletakkan jauh sebelumnya melalui transformasi hukum menjadi senjata perang. Momen krusial *Entstehung* ini terjadi ketika retorika politik "negara gagal" dikodifikasi menjadi dakwaan formal oleh Distrik Selatan New York pada Maret 2020. Penggunaan pasal "narko-terorisme" (21 U.S. Code § 960a) terhadap kepala negara asing yang sedang menjabat menciptakan preseden hukum yang mengubah status konflik antar-negara menjadi prosedur peradilan pidana domestik (*United States Department of Justice, 2020*). Mekanisme ini diperkuat dengan sayembara \$15 juta yang ditawarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, yang secara efektif mengubah status presiden Venezuela dari subjek politik menjadi objek buruan (*bounty*) selayaknya penjahat di era *Wild West* (*United States Department of Justice, 2020*).

Dalam perspektif Foucault yang tertuang dalam *Discipline and Punish*, ini adalah teknologi kekuasaan yang mendisiplinkan: hukum tidak lagi berfungsi untuk mencari keadilan, melainkan menjadi taktik perang (*lawfare*) (Michel Foucault, 1995). Wacana dominan menghubungkan perdagangan narkoba dengan terorisme secara sewenang-wenang untuk menciptakan keadaan darurat yang membenarkan intervensi ekstrateritorial. Sebagaimana dijelaskan oleh *Congressional Research Service*, sanksi yang awalnya diklaim sebagai alat penekan perilaku (*Congressional Research Service, 2025*), kini bermutasi menjadi senjata pemusnah legitimasi. Dengan demikian, kedaulatan nasional Venezuela dianggap batal demi hukum (*null and void*) oleh klaim yurisdiksi domestik Amerika Serikat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis genealogis Michel Foucault, penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi wacana hukum dan keamanan digunakan Amerika Serikat untuk melegitimasi kekerasan ekstrateritorial dalam *Operation Absolute Resolve* dengan mengubah intervensi militer menjadi tindakan yang tampak sah, rasional, dan bermoral. Melalui penelusuran *Herkunft*, penelitian ini menemukan bahwa pelabelan Nicolás Maduro sebagai *narco-terrorist* merupakan kelanjutan dari pola kriminalisasi politik yang sebelumnya digunakan dalam kasus Manuel Noriega di Panama. Pelabelan ini berfungsi menggeser konflik geopolitik menjadi persoalan hukum pidana, sehingga penangkapan Maduro dipersepsikan sebagai penegakan hukum, bukan agresi terhadap negara berdaulat.

Selanjutnya, melalui analisis *Entstehung*, penelitian ini menunjukkan

bahwa wacana tersebut memperoleh legitimasi institusional melalui dakwaan yudisial, sanksi ekonomi, dan penggunaan hukum sebagai instrumen perang (*lawfare*). Di sini, hukum domestik Amerika Serikat diproduksi sebagai rezim kebenaran yang meniadakan klaim kedaulatan Venezuela dan membenarkan tindakan militer lintas batas. Dalam kerangka *power/knowledge*, narasi keamanan yang dominan menyingkirkan pengetahuan alternatif dari Global South dan menormalisasi kekerasan sebagai tindakan perlindungan terhadap stabilitas global. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi kekerasan ekstrateritorial dalam *Operation Absolute Resolve* dibangun melalui pertautan antara praktik militer, instrumen hukum, dan produksi wacana keamanan, yang secara sistematis mengubah kedaulatan dari prinsip hukum internasional menjadi bentuk kedaulatan kontingen yang tunduk pada standar politik dan hukum Amerika Serikat.

REFERENSI

Björnehed, E. (2004). Narco-Terrorism : The Merger of the War on Drugs and the War on Terror. *Global Crime*, 6(3–4), 305–324. <https://doi.org/10.1080/17440570500273440>

Brookings Institution. (2026, January 5). *Making sense of the U.S. military operation in Venezuela*. <https://www.brookings.edu/articles/making-sense-of-the-us-military-operation-in-venezuela/>

Bulletin of the Atomic Scientists. (2026). *Trump goes rogue against Venezuela and lays out his imperialistic goals*.

Calvert, P. (1990). The US intervention in Panama. *Small Wars & Insurgencies*, 1(3), 307–314. <https://doi.org/10.1080/09592319008422962>

Carnegie Endowment for International Peace. (2026, January 12). *The U.S. Plan for Venezuela Has a Precedent. It's Not Good*. <https://carnegieendowment.org/emissary/2026/01/venezuela-plan-trump-fiscal-receivership>

Center for Preventive Action. (2026, February 18). *U.S. Confrontation With Venezuela*. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/instability-venezuela>

Congressional Research Service. (2025, December 5). *Venezuela: Overview of U.S. sanctions policy (IF10715)*. <https://www.congress.gov/crs-product/IF10715>

Connor, S. L., Noe, J., Viola, B. A., Fernandez, A., Townsend, T., | P. T. C., Sales, A. N., Craddock, E. L., Mohiuddin, K., & Levitt, M. (2026, January 8). *Venezuela: Navigating a new era of uncertainty*. <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2026/01/venezuela-navigating-a-new-era-of-uncertainty>

Forsans, N. (2026, January 9). *What lies ahead for Latin America after the Venezuela raid*. <https://theconversation.com/what-lies-ahead-for-latin-america-after-the-venezuela-raid-272774>

Grandin, G. (2006). *Empire's workshop: Latin America, the United States, and the rise of the new imperialism*. Metropolitan Books.

Hewitt, M. (2022). How Does a Foucauldian Genealogical Approach Enhance the Study of Long-Term Care through a Critical Disability Lens? *Societies*, 12(73).

Maresca, A. (2026). *The impact of the second Trump administration on Latin American foreign policy [GIES Papers]*. Ghent University. https://www.ugent.be/ps/politiekewetenschappen/gies/en/research/publications/gies_papers

Mazo4f.com. (2024, June 18). *ALBA - TCP condemns US actions to seize CITGO*. <https://mazo4f.com/en/alba-tcp-condemns-us-actions-to-seize-citgo>

- Mazo4f.com. (2025, August 8). *ALBA-TCP rejects accusations by the US Attorney General against President Nicolás Maduro*. <https://mazo4f.com/en/alba-tcp-rejects-accusations-by-the-us-attorney-general-against-president-nicolas-maduro>
- Michel Foucault. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon (ed.); C. Gordon, L. Marshall, J. Mepham, & K. Soper (trans.)). Pantheon Books.
https://monoskop.org/images/5/5d/Foucault_Michel_Power_Knowledge_Selected_Interviews_and_Other_Writings_1972-1977.pdf
- Michel Foucault. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison* (Alan Sheridan (trans.)). Vintage Books.
https://monoskop.org/images/4/43/Foucault_Michel_Discipline_and_Punish_The_Birth_of_the_Prison_1977_1995.pdf
- Nichols, M. (2026, January 6). *UN chief Guterres raises concerns about instability in Venezuela, legality of US operation*. <https://www.reuters.com/world/americas/un-chief-guterres-raises-concerns-about-instability-venezuela-legality-us-2026-01-05/>
- Schadlow, N. (2024, October 9). *How America Can Regain Its Edge in Great Power Competition*. [https://www.hudson.org/national-security-defense/how-america-can-regain-its-edge-great-power-competition-nadia-schadlow#:~:text=Policy Reset,date with our latest content](https://www.hudson.org/national-security-defense/how-america-can-regain-its-edge-great-power-competition-nadia-schadlow#:~:text=Policy%20Reset,date%20with%20our%20latest%20content).
- Sullivan, J. P., & Jones, N. P. (2024). Hybrid Threats : Cartel and Gang Links to Illicit Global Networks. *International Journal on Criminology*, 11(2), 13–38.
<https://doi.org/10.18278/ijc.11.2.1>
- United States Department of Justice. (2020, March 20). *Nicolás Maduro Moros and 14 current and former Venezuelan officials charged with narco-terrorism [Press release]*. <https://www.justice.gov/opa/pr/nicolas-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>
- Weeks, J., & Zimbalist, A. (1989). The failure of intervention in Panama : Humiliation in the backyard. *Third World Quarterly*, 11(1), 1–27.
<https://doi.org/10.1080/01436598908420137>
- www.un.org. (n.d.). *United Nations Charter (full text)*. Retrieved January 11, 2026, from <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>